

Nama	: Asnia Sundari	Kelas	: 24B
NPM	: 2413031040	Mata Kuliah	: Teori Akuntansi

## Pertemuan 15 Case Study 1

---

### **Kasus PT Hijau Lestari**

PT Hijau Lestari, sebuah perusahaan agribisnis di Indonesia, sedang mempersiapkan sustainability reporting (laporan keberlanjutan) sesuai dengan standar GRI (Global Reporting Initiative). Perusahaan ini mempertimbangkan untuk menggunakan teknologi blockchain guna meningkatkan transparansi dan integritas data dalam laporan keberlanjutan mereka, khususnya terkait jejak karbon dan sumber bahan baku.

Namun, manajemen belum sepenuhnya memahami implikasi akuntansi dan etika dari penggunaan blockchain dalam pelaporan tersebut, serta bagaimana hal ini akan diterima oleh stakeholder dan regulator di Indonesia.

Pertanyaan:

1. Analisislah bagaimana penggunaan teknologi blockchain dapat mempengaruhi teori akuntansi yang terkait dengan reliabilitas dan transparansi informasi akuntansi dalam konteks sustainability reporting.
2. Evaluasilah tantangan yang mungkin dihadapi PT Hijau Lestari jika menerapkan teknologi ini dalam konteks regulasi Indonesia dan global.
3. Berikan rekomendasi strategis berbasis teori akuntansi dan perkembangan teknologi yang dapat mendukung keberhasilan implementasi ini.

### **Analisis Studi Kasus PT Hijau Lestari**

1. Penggunaan blockchain dapat memperkuat teori akuntansi terkait reliabilitas dan transparansi karena setiap data yang tercatat bersifat *immutable* (tidak dapat diubah), tercatat dalam distributed ledger, dan dapat ditelusuri kembali (*traceable*). Dalam *sustainability reporting*, terutama jejak karbon dan asal bahan baku, blockchain membantu memastikan bahwa informasi yang disampaikan benar, konsisten, dan bebas manipulasi. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntansi bahwa laporan harus *reliable* dan *faithfully represented*. Namun, teknologi ini juga menantang konsep

tradisional akuntansi karena akuntan harus memahami mekanisme verifikasi digital, bukan hanya dokumen fisik seperti sebelumnya. Misalnya terdapat PT Perkebunan Nusantara (PTPN) yang pernah bekerja sama dengan perusahaan teknologi untuk melacak asal-usul TBS (Tandan Buah Segar) sawit agar tidak berasal dari kawasan ilegal. Jika data ini dicatat dengan blockchain, setiap transaksi, mulai dari petani, pabrik, hingga distributor, akan otomatis tercatat dan tidak dapat diubah. Maka, ketika PT Hijau Lestari itu melaporkan carbon footprint, tidak mungkin lagi ada rekayasa angka karena seluruh jejak pergerakan bahan baku terekam permanen, sehingga memperkuat reliabilitas laporan, seperti yang diharuskan dalam standar GRI.

2. Tantangan PT Hijau Lestari terletak pada ketidaksiapan regulasi karena Indonesia belum memiliki pedoman khusus terkait penggunaan blockchain dalam pelaporan keberlanjutan. Hal serupa juga terjadi secara global, di mana standar GRI belum secara eksplisit mengatur mekanisme pencatatan berbasis blockchain. Selain itu, penerapan blockchain membutuhkan biaya tinggi, sumber daya manusia yang kompeten, dan koordinasi dengan pemasok agar data yang masuk valid. Jika tidak disiapkan dengan baik, teknologi ini justru dapat menimbulkan data inconsistency, resistensi dari stakeholder, serta keraguan regulator atas keaslian proses pengumpulan datanya. Contoh tantangan serupa pernah terjadi pada pertukaran aset kripto di Indonesia, seperti Tokocrypto dan Indodax, yang menghadapi ketidakpastian regulasi ketika OJK dan Bappebti belum sepenuhnya selaras terkait aturan aset digital (Primantoro, 2024). Jika PT Hijau Lestari memakai blockchain untuk sustainability reporting, kemungkinan akan menghadapi kebingungan serupa karena belum ada pedoman resmi bagaimana regulator menilai validitas data blockchain dalam pelaporan ESG. Ditambah lagi, jika ada pemasok kecil (misalnya petani lokal) tidak mengerti teknologi, maka data rantai pasok bisa terputus.
3. PT Hijau Lestari sebaiknya memulai dengan pilot project yang melibatkan satu rantai pasok agar dapat menguji efektivitas blockchain sebelum diterapkan secara luas. Perusahaan juga perlu menyusun governance framework berbasis teori akuntansi, seperti prinsip verifiability dan consistency, untuk memastikan bahwa teknologi digunakan sesuai etika dan standar pelaporan. Selain itu, perusahaan harus

membangun kerja sama dengan regulator, auditor independen, dan ahli teknologi agar implementasinya sesuai dengan GRI Standards serta perkembangan ESG global. Pendekatan bertahap dan kolaboratif ini akan meningkatkan peluang keberhasilan sekaligus menjaga kepercayaan stakeholder.

### **Sumber Rujukan**

- Global Reporting Initiative. (2020). *GRI Standards: Consolidated Set 2020*. GRI.
- International Accounting Standards Board. (2021). *The Conceptual Framework for Financial Reporting*. IFRS Foundation.
- Primantoro, A. Y. (2025, 2 Januari). *Peralihan pengawasan aset kripto belum jelas, pemerintah perlu segera terbitkan PP*. Kompas. <https://www.kompas.id/artikel/pp-belum-terbit-peraturan-dan-pengawasan-aset-kripto-masih-tarik-ulur>